

## **IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI SD YPPK GEMBALA BAIK KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA**

**KUSWANTO<sup>1</sup>, YULIUS MATAPUTUN<sup>\*2</sup>, BONIFASIA ELITA BHARANTI<sup>3</sup>**

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cenderawasih, Jayapura  
E-mail: <sup>1</sup>kuswanto.lpmppapua@gmail.com; <sup>2</sup>yuliusmataputun1965@gmail.com;  
<sup>3</sup>elitabharanti@gmail.com

\*) Korespondensi: yuliusmataputun1965@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi langkah-langkah Sistem Penjaminan Mutu Internal (Pemetaan mutu, penyusunan rencana pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, evaluasi audit mutu dan penyusunan standar di atas SNP) di SD YPPK Gembala Baik Kota Jayapura Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif rancangan studi kasus. Objek penelitiannya kepala sekolah, ketua penjamin mutu sekolah, para koordinator mutu dan ketua komite sekolah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan pengecekan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik kredibilitas data, yaitu ketekunan pengamatan, dan diskusi teman sejawat, dan triangulasi. Analisis datanya menggunakan tahapan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, SD YPPK Gembala Baik Kota Jayapura Provinsi Papua telah mengimplementasi langkah-langkah SPMI dengan baik sesuai petunjuk pelaksanaan SPMI-Dikdasmen dalam berbagai bentuk kegiatan berikut. (1) kepala sekolah memimpin proses pemetaan mutu, memastikan tanggungjawab pemetaan mutu terbagi dan menjadi bagian dalam pengelolaan sekolah, mengarahkan seluruh warga sekolah bekerjasama, fokus melaksanakan evaluasi dan peningkatan kualitas sekolah; (2) perencanaan pemenuhan mutu melalui penyusunan dokumen RKS/RKAS; (3) melaksanakan pemenuhan mutu dengan penetapan penanggungjawab dan jadwal, alokasi pendanaan, sesuai kondisi, dan pelaporan program/kegiatan; (4) melaksanakan evaluasi/audit internal dengan penetapan indikator evaluasi, penyusunan instrumen, pengumpulan data, Analisis dan penyusunan rekomendasi; dan (5) penyusunan standar mutu baru dengan melaksanakan *benchmarking*, mengakses aturan terkait SNP, mempelajari dan merumuskan indikator mutu beserta kriterianya sesuai dengan SNP, sosialisasi peraturan, merumuskan indikator dan menetapkannya bersama *stakeholder* sebagai acuan mutu awal penyelenggaraan pendidikan.

**Kata Kunci:** sistem penjaminan mutu; internal

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of the steps of the Internal Quality Assurance System (quality mapping, preparation of quality compliance plans, implementation of quality compliance, evaluation of quality audits and preparation of standards on National Standard in Education) at SD YPPK Gembala Baik, Jayapura City, Papua Province. This study used a qualitative descriptive approach to a case study design. The object of research is the principal, the head of school quality assurance, the quality coordinators and the head of the school committee. The data collection techniques used participatory observation, in-depth interviews, and checking documentation. The validity test of the data used data credibility techniques, namely triangulation, observation persistence, and peer discussion. Data analysis: data reduction, data display, and*

*conclusion / verification. The results of this study indicate that in general, SD YPPK Gembala Baik, Jayapura City, Papua Province has implemented the SPMI steps properly according to the SPMI-Dikdasmen implementation guidelines in the following forms of activities. (1) lead the quality mapping process, ensure that the responsibility for quality mapping is shared and become part of school management, directs all school members to work together, focuses on evaluating and improving school quality; (2) planning for quality compliance through compiling RKS / RKAS documents; (3) carry out the fulfillment of quality by determining the person in charge and schedule, allocation of funding, according to conditions, and reporting of programs / activities; (4) carry out evaluation / internal audit by establishing evaluation indicators, compiling instruments, collecting data, analyzing and preparing recommendations; and (5) formulating new quality standards by implementing benchmarking, accessing rules related to SNP, studying and formulating quality indicators and their criteria in accordance with SNPs, socializing regulations, formulating indicators and establishing them with stakeholders as a reference for the initial quality of education.*

**Keywords:** *internal; quality assurance system*

## **PENDAHULUAN**

Penjaminan mutu telah menjadi isu penting di hampir seluruh organisasi/institusi termasuk sektor pendidikan yang dituntut untuk menempatkan mutu sebagai perhatian bahkan menjadi kewajiban utama bagi setiap penyelenggara pendidikan, karena pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas pula. Berbagai pihak menginginkan kualitas pendidikan yang baik dan bermutu bahkan berdampak positif bagi banyak orang, karena tuntutan zaman yang semakin maju menjadikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) semakin berkembang pesat, sehingga masyarakat pun menjadi lebih cerdas dan kebutuhannya terhadap pendidikan yang lebih bermutu, sangat diharapkan masyarakat terutama pihak pengguna jasa pendidikan.

Berdasarkan sisi kebijakan keberpihakan pada kebutuhan pengguna jasa

pendidikan seperti yang dipapar di atas, telah ditetapkan dalam tata kelola pendidikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) yang penerapannya dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang sekarang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang pada prinsipnya memberikan arah tentang perlunya disusun dan dilaksanakan 8 SNP yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Standar-standar tersebut merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai

dasar dalam perencanaan, mutu atau kualitas, yang menjadi isu penting persaingan global.

Rambu-rambu tata kelola pendidikan yang telah ditetapkan di atas, diharapkan menjadi sentra perhatian utama dalam setiap kebijakan dan operasional pendidikan termasuk pada satuan pendidikan dasar, yang hasilnya dapat ditunjukkan dengan sejumlah prestasi sekolah yang bermakna dan/atau berdampak. Hasil kajian Neng & Mauli (2019) menemukan bahwa penerapan penjaminan mutu internal di SMP Darul Falah Cihampelas berdampak pada proses pembelajaran yang lebih inovatif, prestasi siswa dan capaian sekolah, hingga kepuasan pelanggan baik internal maupun eksternal, serta pemenuhan 8 SNP. Namun dalam berbagai kajian, mutu pendidikan dasar di Indonesia dirasa masih rendah, seperti dikatakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2016) bahwa secara nasional, hasil pemetaan mutu pendidikan menunjukkan hanya 16% satuan pendidikan yang memenuhi SNP. Itu berarti sebagian besar satuan pendidikan lain belum memenuhi SNP. Hasil pemetaan mutu di atas, belum sepenuhnya disikapi secara serius oleh berbagai pihak, termasuk satuan pendidikan dasar. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi *Programme for International Student Assessment* (PISA) yang baru rilis, Selasa 3 Desember 2019, skor membaca Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara, lalu skor matematika ada di peringkat 72 dari 78

negara, dan skor sains ada di peringkat 70 dari 78 negara. Tiga skor itu kompak menurun dari tes PISA 2015. Kala itu, skor membaca Indonesia ada di peringkat 65, skor sains peringkat 64, dan skor matematika peringkat 66. Bahkan di antara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia berada paling bawah bersama Filipina (Kurnia, 2019).

Capaian mutu pendidikan masih rendah di atas, tentu saja disebabkan berbagai faktor, diantaranya adalah tata kelola satuan pendidikan dasar belum mencerminkan apa yang diharapkan dari regulasi dan rambu-rambu penyelenggaraan SNP. Sebagai upaya peningkatan mutu di sekolah dalam rangka Implementasi Permendikbud 28 Tahun 2016 dikatakan bahwa Satuan Pendidikan berkewajiban untuk membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) pasal 11 ayat 1 (e) dan ayat 5 terdiri dari: perwakilan pimpinan satuan pendidikan; perwakilan guru; perwakilan tenaga kependidikan; dan perwakilan komite sekolah.

Penjaminan mutu merupakan suatu sistem dalam pengelolaan mutu yang di dalamnya terdapat prosedur pengelolaan organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Tujuan utama dari sistem pengelolaan mutu adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam proses dengan mengupayakan agar setiap langkah yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang

ditetapkan. Dengan sistem pengelolaan mutu maka diharapkan mutu keluaran bisa dijamin sehingga memuaskan pelanggan (*stakeholder*).

Sistem penjaminan mutu pendidikan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 dijelaskan bahwa SPMI adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan sistem penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan yang bermutu yang memenuhi atau melampaui SNP. Sistem penjaminan mutu ini dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan dan juga ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Agar pelaksanaan SPMI dapat dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan dengan optimal, perlu dikembangkan satuan pendidikan yang akan menjadi model penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, yang selanjutnya disebut sekolah model, sebagai gambaran langsung kepada satuan pendidikan lain yang akan menerapkan penjaminan mutu pendidikan sehingga terjadi

pola pengimbasan pelaksanaan penjaminan mutu hingga ke seluruh satuan pendidikan di Indonesia dan Provinsi Papua. Sekolah model dinaungi langsung atau dibina oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Papua. Setiap kabupaten atau kota dipilih sekolah yang dianggap mampu menjadi model untuk sekolah lain disekitarnya, salah satu sekolah yang telah berhasil menerapkan program sekolah model yaitu SD Gembali Baik Kota Jayapura Provinsi Papua. Hasil kajian Darmaji dkk., (2020) mengatakan bahwa langkah penjaminan mutu internal sekolah melalui SPMI dalam menjamin mutu internal sekolah melalui Plan, Do, Check, dan Act. Selain itu Dampak implementasi penjaminan mutu internal yang dilaksanakan SD Plus Al-kautsar Kota Malang yakni prestasi sekolah telah diraih baik berskala nasional maupun internasional citra sekolah meningkat. Karena itu peneliti melakukan kajian ini untuk menganalisis implementasi SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) di SD Gembala Baik Kota Jayapura

Dipilihnya SD Gembala Baik Kota Jayapura Provinsi Papua sebagai fokus perhatian dalam kajian ini didasarkan pada keunikan, kemenarikan, dan urgensinya. Dari sisi keunikannya, sekolah ini merupakan sekolah yang sudah cukup lama dengan berbagai pengalaman karena berdiri sejak 24 Agustus 1964 dan sering menjadi sekolah rujukan bagi berbagai kepentingan pendidikan

di Kota Jayapura seperti sekolah adiwiyata mandiri dan sekolah rama anak. Kemenarikannya karena proses kepemimpinan dan prestasi akademik dan non akademik menonjol pada tingkat Satuan Pendidikan, Kota, Provinsi dan Nasional bahkan status akreditasi, terakreditasi A (unggul). Keunggulan sekolah ini sejalan dengan hasil kajian Darmaji, dkk., (2020) mengatakan dampak implementasi penjaminan mutu internal yang dilaksanakan SD Plus AI-kautsar Kota Malang yakni prestasi sekolah telah diraih baik berskala nasional maupun internasional serta citra sekolah meningkat.

Dilihat dari sisi urgensinya dan/atau pentingnya penelitian ini yaitu untuk mendapat gambaran implementasi SPMI di sekolah model dan diharapkan menjadi salah satu contoh praktik baik tata kelola satuan pendidikan lainnya yang mengakomodir SNP sebagaimana dikatakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2016) bahwa implementasi pemenuhan mutu satuan pendidikan adalah realisasi seluruh program dan kegiatan yang telah dirancang dan telah tertuang dalam dokumen perencanaan pemenuhan mutu satuan pendidikan yang harus dikerjakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Apa yang mereka capai perlu diungkap dan dikaji secara empirik, dan dipublikasikan untuk berbagai kepentingan pengembangan khasana keilmuan dan minimal menjadi salah satu referensi bagi

satuan pendidikan lainnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif rancangan studi kasus. Objek penelitiannya kepala sekolah, ketua penjamin mutu sekolah, para koordinator mutu (pemetaan mutu, rencana pemenuhan mutu, monev dan audit mutu) dan ketua komite sekolah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan pengecekan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik kredibilitas data, yaitu Memperpanjang pengamatan, diskusi teman sejawat, dan triangulasi. Untuk menganalisis data, digunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil analisis data, maka temuan penelitian ini yaitu secara umum, SD YPPK Gembala Baik Kota Jayapura Provinsi Papua telah mengimplementasi langkah-langkah SPMI dengan baik dengan berbagai bentuk kegiatan, yaitu **Pertama**, kepala sekolah memimpin proses pemetaan mutu, memastikan tanggungjawab pemetaan mutu terbagi dan menjadi bagian dalam pengelolaan sekolah, mengarahkan seluruh

warga sekolah bekerjasama, fokus dalam melaksanakan evaluasi dan peningkatan kualitas sekolah dengan baik. Kegiatan EDS melibatkan komunitas sekolah seperti kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, komite, orang tua murid, peserta didik, perwakilan yayasan, pengawas serta pemangku kepentingan di luar satuan pendidikan. Setiap komponen memiliki peran masing-masing.

**Kedua**, sistem penjaminan mutu dalam kegiatan penyusunan rencana pemenuhan mutu sudah baik dengan berbagai kegiatan, seperti menyusun dokumen RKS-RKAS, dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti menyesuaikan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator, melibatkan *stakeholder* pendidikan, berdasarkan analisis data EDS, menggunakan alat bantu manajemen (analisis SWOT, analisis medan kekuatan, analisis pohon strategi). Dalam perencanaan pemenuhan mutu, baseline yang menjadi acuan adalah rapor mutu sekolah berdasarkan 8 SNP. SD YPPK Gembala Baik Kota Jayapura berdasarkan analisis rapor mutu memprioritaskan standar sarana dan prasarana dengan pertimbangan nilai raport mutu 4,45 yang terendah dan untuk menciptakan suasana nyaman, bersih dan sehat. menciptakan suasana kelas dan halaman dengan mengadakan penghijauan

melalui taman-taman di depan kelas sekolah menjadi tertata rapi.

**Ketiga**, dalam pemenuhan mutu, dengan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu menetapkan penanggung jawab kegiatan, pengusulan tim organisasi pelaksana serta pihak-pihak yang akan terlibat, menentukan jadwal kegiatan, dan menetapkan bukti fisik yang mendukung keterlaksanaan kegiatan. Berbagai program telah dilaksanakan dilengkapi dengan laporannya disusun dalam almari 8 SNP dan terdokumen dengan baik. Sekolah menetapkan tim pengendalian mutu internal, yaitu ketua penjamin mutu sekolah, para koordinator mutu (pemetaan mutu, rencana pemenuhan mutu, monev dan audit mutu) dan ketua komite sekolah. keterlibatan banyak orang dengan kapasitas tugas dan fungsinya dapat menata sekolah ini lebih baik.

**Keempat**, dalam kegiatan evaluasi/audit internal telah diimplementasi secara baik, seperti memperhatikan penetapan indikator evaluasi, penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis dan penyusunan rekomendasi. Sekolah memiliki dokumen hasil pemetaan mutu yang dimanfaatkan sebagai bahan refleksi perbaikan mutu ke depannya.

**Kelima**, dalam kegiatan penyusunan standar mutu baru diimplemnetasikan melalui berbagai kegiatan, seperti *benchmarking*, mengakses aturan-aturan terkait SNP, mempelajari dan merumuskan indikator mutu

beserta kriterianya sesuai dengan SNP, sosialisasi peraturan dan rumusan indikator tersebut kepada pemangku kepentingan, dan bersama pemangku kepentingan menetapkan hasil rumusan sebagai acuan mutu awal dalam penyelenggaraan pendidikan.

### **Pembahasan**

Secara umum langkah-langkah dalam SPMI sesuai petunjuk Dikdasmen dengan baik di SD YPPK Gembala Baik Kota Jayapura Provinsi Papua dalam berbagai bentuk kegiatan berikut. **Pertama**, dalam sistem penjaminan mutu dalam kegiatan pemetaan mutu yaitu memimpin proses pemetaan mutu, memastikan tanggungjawab pemetaan mutu terbagi dan menjadi bagian dalam pengelolaan sekolah, mengarahkan seluruh warga sekolah bekerjasama, fokus dalam melaksanakan evaluasi dan peningkatan kualitas sekolah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Permendikbud 28 Tahun 2016 pada pasal 5 ayat 1 bahwa langkah-langkah pemetaan mutu SPMI yaitu: Penetapan indikator mutu berdasarkan SNP Penyusunan instrumen (oleh Tim Pengembang Sekolah), Pengumpulan data EDS dengan melibatkan *stakeholder*, Analisis data EDS dan penetapan masalah.

Beberapa alasan mendasar pentingnya sekolah melakukan pemetaan mutu, diantaranya (1) dapat memperjelas, menyederhanakan, dan menerangkan suatu

aspek yang dipentingkan. (2) dapat menonjolkan pokok-pokok batasan dalam tulisan atau pembicaraan. (3) dipakai sebagai sumber data bagi yang berkepentingan. Sebagai (4) sebagai alat komunikasi antara membuat peta dengan pengguna dimana akan memudahkan dalam penyampaian informasi. Kegiatan pemetaan di SD YPPK Gembala Baik Kota Jayapura dilaksanakan melalui kegiatan EDS. Seluruh komponen sekolah terlibat dalam proses pemetaan mutu seperti kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, komite, orang tua murid, peserta didik, perwakilan yayasan, pengawas serta pemangku kepentingan di luar satuan pendidikan. Setiap komponen memiliki peran masing-masing.

**Kedua**, dalam penyusunan rencana pemenuhan mutu, sekolah menyusun dokumen RKS-RKAS, dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti menyesuaikan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator, melibatkan *stakeholder* pendidikan, berdasarkan analisis data EDS, menggunakan alat bantu manajemen (analisis SWOT, analisis medan kekuatan, analisis pohon strategi). Dalam perencanaan pemenuhan mutu, *baseline* yang menjadi acuan adalah rapor mutu sekolah berdasarkan 8 SNP. SD YPPK Gembala Baik Kota Jayapura berdasarkan analisis rapor mutu memprioritaskan standar sarana dan prasarana dengan pertimbangan nilai

raport mutu (4.45) yang terendah dan untuk menciptakan suasana nyaman, bersih- sehat, menciptakan suasana kelas dan halaman dengan program/kegiatan penghijauan melalui taman-taman di depan kelas sekolah menjadi tertata rapi. Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan Permendikbud 28 Tahun 2016 pada pasal 5 ayat 1 bahwa langkah-langkah perencanaan pemenuhan mutu SPMI yaitu (1) Membangun visi bersama atau visioning dilakukan untuk membangun komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan mengenai kondisi yang diharapkan pada masa yang akan datang. (2) Menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah pemenuhan mutu. Penyusunan rencana dilakukan dengan cara menyempurnakan RKJM dalam RKS yang meliputi: Arah kebijakan dan program kerja sekolah, Strategi dan kegiatan pemenuhan mutu sekolah, Indikator dan sasaran kinerja sekolah, Anggaran, Sumber daya. (3) Menjabarkan Rencana Kerja Jangka Menengah kedalam Rencana kerja dan Anggaran Tahunan Sekolah.

**Ketiga**, dalam sistem penjaminan mutu internal sekolah menetapkan penanggung jawab kegiatan, pengusulan tim organisasi pelaksana serta pihak-pihak yang akan terlibat, menentukan jadwal kegiatan, dan menetapkan bukti fisik yang mendukung keterlaksanaan kegiatan. Berbagai program telah dilaksanakan dilengkapi dengan

laporannya disusun dalam almari 8 SNP dan terdokumen dengan baik. Sekolah menetapkan tim pengendalian mutu internal, yaitu ketua penjamin mutu sekolah, para koordinator mutu (pemetaan mutu, rencana pemenuhan mutu, monev dan audit mutu) dan ketua komite sekolah. keterlibatan banyak orang dengan kapasitas tugas dan fungsinya dapat menata sekolah ini lebih baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan Temuan Walid, (2019) menunjukkan bahwa penerapan standar mutu di SDIT Insan Permata dilaksanakan dengan pembuatan program kerja diawal tahun dan kemudian membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tiap kegiatan.

**Keempat**, dalam sistem penjaminan mutu kegiatan evaluasi/audit internal dilakukan dengan memperhatikan penetapan indikator evaluasi, penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis dan penyusunan rekomendasi. Sekolah memiliki dokumen hasil pemetaan mutu yang dimanfaatkan sebagai bahan refleksi perbaikan mutu ke depannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dikatakan Hajar (2017) bahwa evaluasi/audit mutu yang dilakukan madrasah untuk meningkatkan kinerja madrasah pada MTs Assurur dan MTs Arrohmah Kota Tasikmalaya telah dilakukan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pelaksanaan Evaluasi formatif yang mengacu pada indikator proses, evaluasi sumatif yang

mengacu pada indikator *output*, *outcome* dan dampaknya dan melakukan audit terhadap proses pemenuhan SNP sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Juga hasil penelitian dari Rahwati (2019) menunjukkan evaluasi pemenuhan mutu di SD Negeri 2 Gunungpereng sudah dilaksanakan dengan baik. Data evaluasi pemenuhan mutu diperoleh dari evaluasi melalui evaluasi diri sekolah, tujuan evaluasi, dan tahapan evaluasi. Evaluasi diri sekolah dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian kinerja sekolah atas apa yang telah direncanakan. Evaluasi yang dilakukan melalui evaluasi diri sekolah berfokus pada hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan yang telah disusun dalam rencana kerja tahunan, sehingga pedoman dalam evaluasinya berdasar indikator keberhasilan pada rencana kerja tahunan.

**Kelima**, Implementasi SPMI dalam kegiatan penyusunan standar mutu baru dilakukan dalam berbagai kegiatan, seperti *benchmarking*, mengakses aturan-aturan terkait SNP, mempelajari dan merumuskan indikator mutu beserta kriterianya sesuai dengan SNP, menyosialisasikan peraturan dan rumusan indikator tersebut kepada pemangku kepentingan, dan bersama pemangku kepentingan menetapkan hasil rumusan sebagai acuan mutu awal dalam penyelenggaraan pendidikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rosdiana &

Soedarmo (2019) menemukan bahwa Sekolah Model dan Sekolah Imbas telah melaksanakan tahapan *Benchmarking*. Kedua sekolah tersebut selalu menganalisis kebutuhan, kekuatan dan kelemahan masing-masing sekolah untuk perbaikan mutu mendatang. Strategi sangat penting dilakukan oleh kedua sekolah karena dengan adanya rencana dan strategi yang terarah, sistematis dan procedural maka mutu sekolah pun akan meningkat dengan adanya kedisiplinan dari setiap warga sekolah untuk mewujudkan sekolah yang bermutu serta output yang berkualitas. Hasil penelitian ini dengan kajian terdahulu seperti dipaparkan di atas, memperlihatkan bahwa sekolah perlu memahai dan melaksanakan standar mutu yang dibutuhkan pengguna jasa bahkan diperlukan standar yang melebihi SNP, seperti dikatakan Sallis (2012) mengungkapkan bahwa produk dikatakan memiliki mutu atau berkualitas apabila memenuhi dua unsur yakni dapat memenuhi keinginan dan harapan pelanggan dan menetapkan spesifikasi yang tinggi. Sekolah tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan sekolah bermutu, tetapi perlu melakukan berbagai upaya dan melibatkan pihak-pihak terkait terutama institusi yang memiliki visi dan misi yang sama.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya maka dapat

disimpulkan bahwa secara umum, SD YPPK Gembala Baik Kota Jayapura Provinsi Papua telah mengimplementasi langkah-langkah SPMI sesuai dengan petunjuk pelaksanaan SPMI-Dikdasmen dalam berbagai bentuk kegiatan berikut. **Pertama**, kegiatan pemetaan mutu sudah diimplementasikan dengan cara memimpin proses pemetaan mutu, memastikan tanggungjawab pemetaan mutu terbagi dan menjadi bagian dalam pengelolaan sekolah, mengarahkan seluruh warga sekolah bekerjasama, fokus dalam melaksanakan evaluasi dan peningkatan kualitas sekolah; **Kedua**, perencanaan pemenuhan mutu melalui kegiatan menyusun dokumen RKS/RKAS, dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator, melibatkan *stakeholder* pendidikan, berdasarkan analisis data EDS, menggunakan alat bantu manajemen (analisis SWOT, analisis medan kekuatan, analisis pohon strategi); **Ketiga**, pelaksanaan pemenuhan mutu selalu memperhatikan hal-hal berikut, yaitu menetapkan penanggungjawab kegiatan, pengusulan tim organisasi pelaksana serta berbagai pihak terlibat, menentukan jadwal kegiatan, dan menetapkan bukti fisik yang mendukung keterlaksanaan kegiatan; **Keempat**, evaluasi/audit internal selalu memperhatikan hal-hal berikut penetapan indikator evaluasi, penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis dan penyusunan

rekomendasi; **Kelima**, penyusunan standar mutu baru dalam SPMI telah dilaksanakan yaitu Benchmarking, mengakses aturan-aturan terkait SNP, mempelajari dan merumuskan indikator mutu beserta kriterianya sesuai dengan SNP, menyosialisasikan peraturan, rumusan indikator dan menetapkannya bersama *stakeholders* sebagai acuan mutu awal penyelenggaraan pendidikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Darmaji, Achmad, Agus, Maulana. 2020. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Satuan Pendidikan Dasar studi kasus di SD Plus AI - Kautsar Kota Malang, *Jurnal Pendidikan Nusantara*. 5 (2): 172 - 186.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 2016. *Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Hajar, R. 2017. Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Kinerja Madrasah: Studi di MTs Assurur dan MTs Arrohmah Kota Tasikmalaya, *Indonesian Journal of Education Management and Administration*. 1 (1): 89-98.
- Kurnia, T. 2019. Skor Terbaru PISA: Indonesia Merosot di Bidang Membaca, Sains, dan Matematika *Liputan6.com, Jakarta*.  
(online). <https://www.liputan6.com/global/read/4126480/skor-terbaru-pisa-indonesia-merosot-di-bidang-membaca-sains-dan-matematika>, diakses 18 Juni 2020.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 *Tentang Sistem*

*Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 *tentang Perubahan PP 19 Tahun 2005*

Rahwati, R. 2019. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar. *Indonesian Journal of Education Management and Administration Review*. 3 (1): 13-24

Rosdiana, F dan Ung. R. S (2019). Sistem penjaminan mutu dalam mewujudkan mutu sekolah pada sekolah model dan sekolah imbas. *Indonesian Journal of*

*Education Management and Administration Review*. 3 (1): 83-88.

Neng Gustini dan Y. Mauli. 2019. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar; Studi di SMP Darul Falah Cihampelas, *Jurnal Islamic Education Manajemen*. 4 (2): 229-244.

Sallis, E. 2012. *Total Quality Manajemen In Education*. Yogyakarta: Diva Press.

Walid Fajar Antariksa. 2019. Analisis Sistem Penjaminan Mutu di Sekolah Dasar Berbasis Islamic Fullday School Malang, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*. 11 (2): 75–84.